

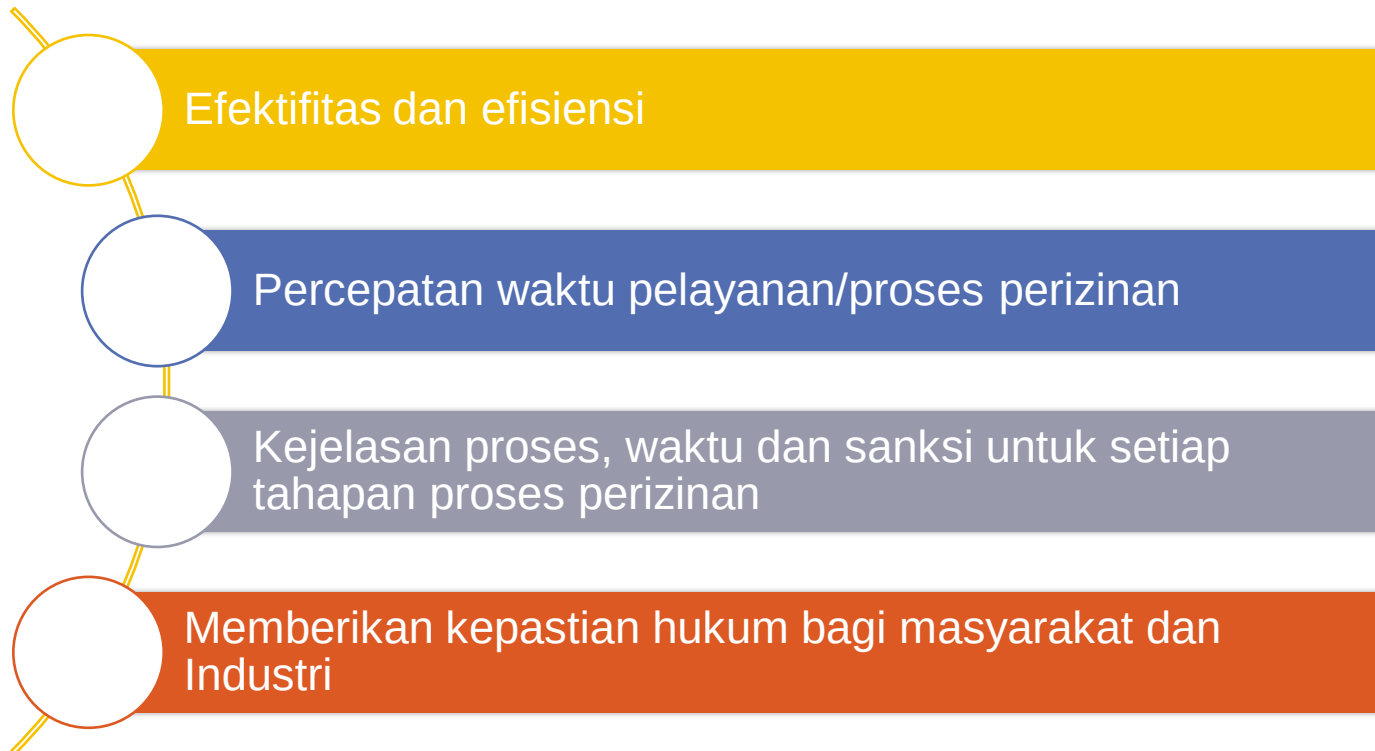


TANTANGAN DAN DUKUNGAN KELEMBANGAAN DALAM PENERAPAN PELAYANAN OSS (ONLINE SINGLE SUBMISSION)

DR. HJ. R. IRA IRAWATI, MS |

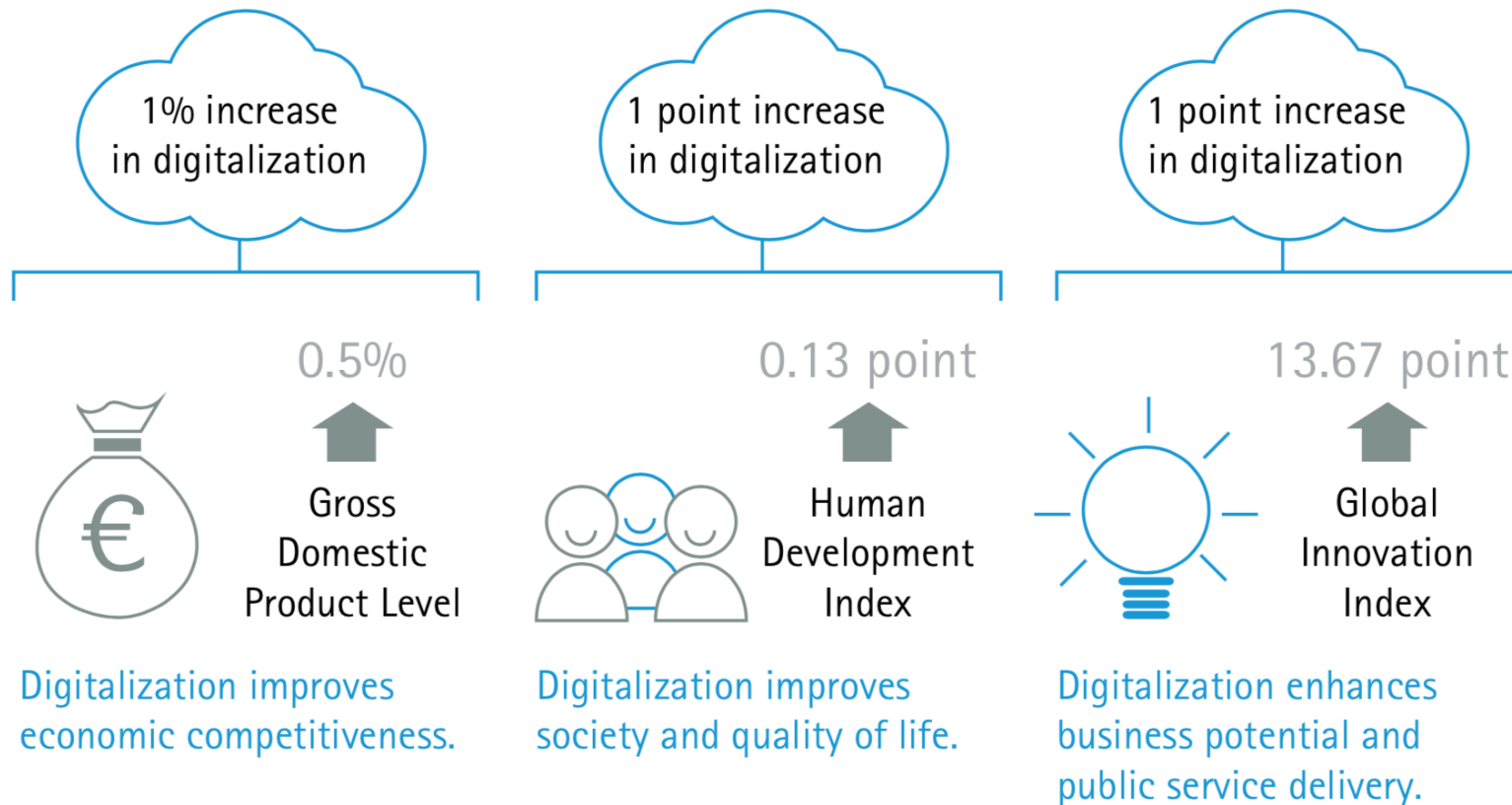
Bandung, October 17th, 2018

LATAR BELAKANG



LATAR BELAKANG

Digitalization Positive impact...



Source: *Achieving Digital Excellence in Public Service*

(<http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/Accenture-Achieving-Digital-Excellence-in-Public-Service-US.pdf>), 2014

LATAR BELAKANG

Pasal 1, ayat 5

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Pasal 1, ayat 11

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

DASAR PERATURAN PELAYANAN SATU PINTU VS ONLINE SINGLE SUBMISSION

Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

OSS (PP 24/2018)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

InPres 3/ 2003, tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government

4 (empat) tingkatan e-Govt :
1.Persiapan
2.Pematangan
3.Pemantapan
4.pemanfaatan

Permendagri 24/2006, Tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu

- Akses Luas (Pasal 2)
- Pengurangan Berkas Manual (Pasal 4.e)
- Memiliki Basis Data elektronik (Pasal 15.1)

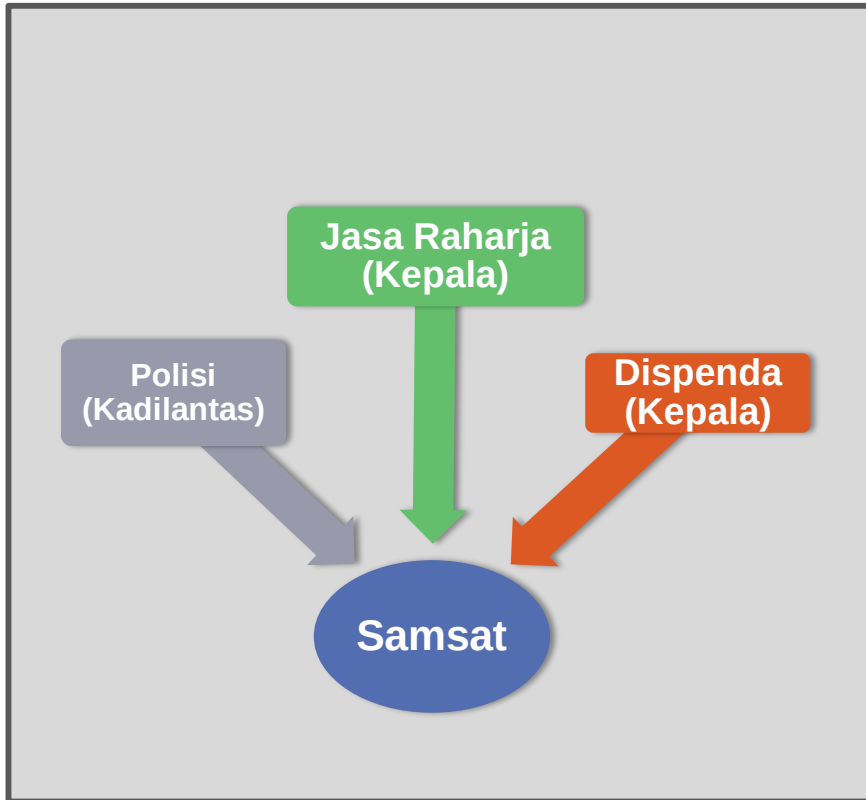
PP 96/2012, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

- Memperpendek Proses pelayanan (Pasal 12.c)
- Pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau (Pasal 12.d)
- Kemudahan akses (Pasal 12.e),
- Keterpaduan, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas; dan aksesibilitas (Pasal 13).
- Dilaksanakan secara elektronik (Pasal 14)

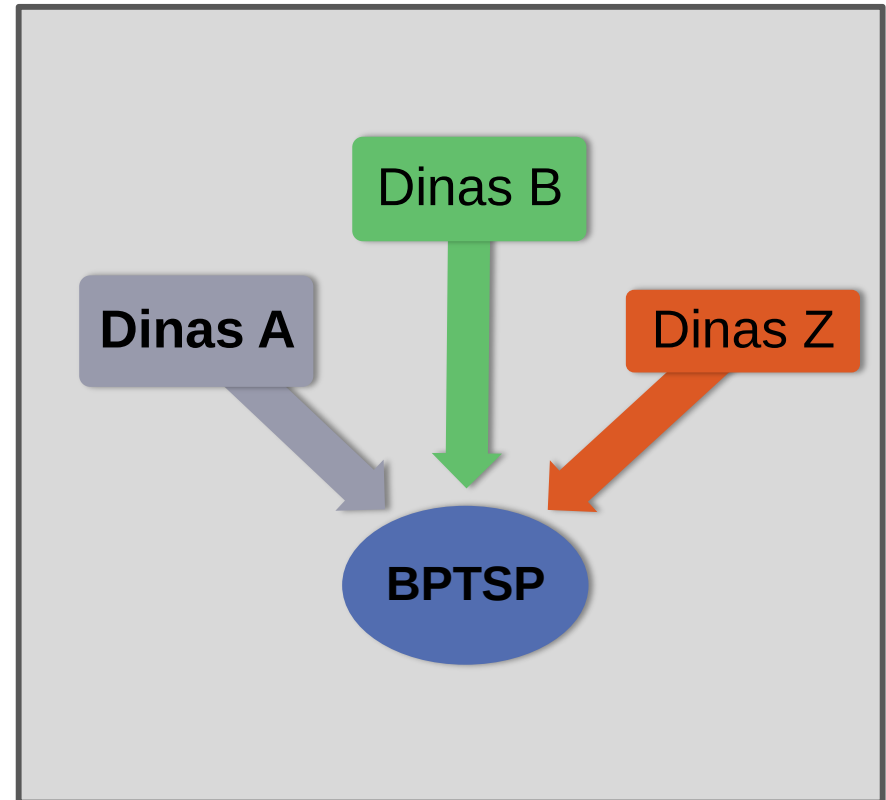
**Pelayanan
Satu Atap**



**Pelayanan
Satu Pintu**

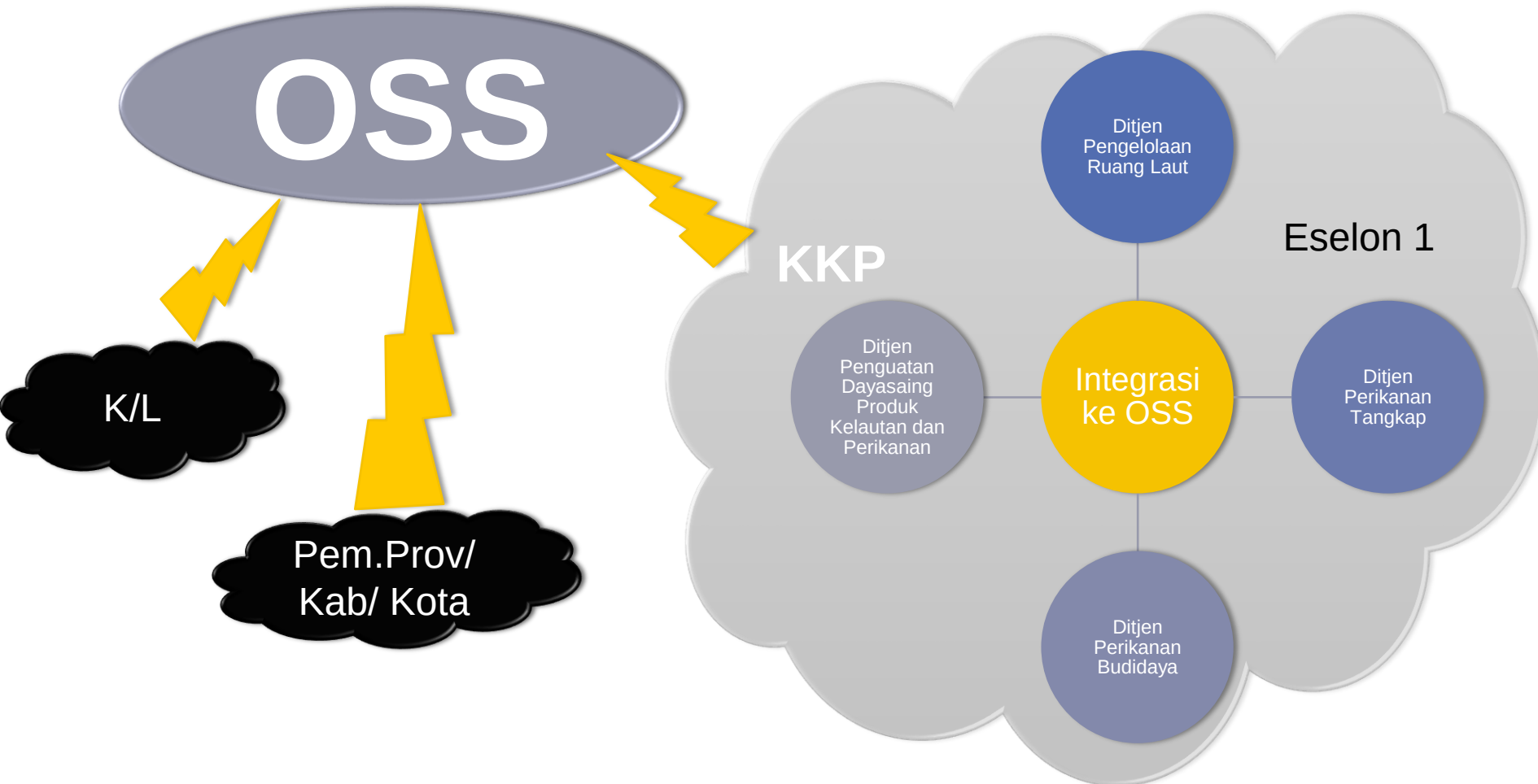


SATU ATAP, BANYAK PINTU

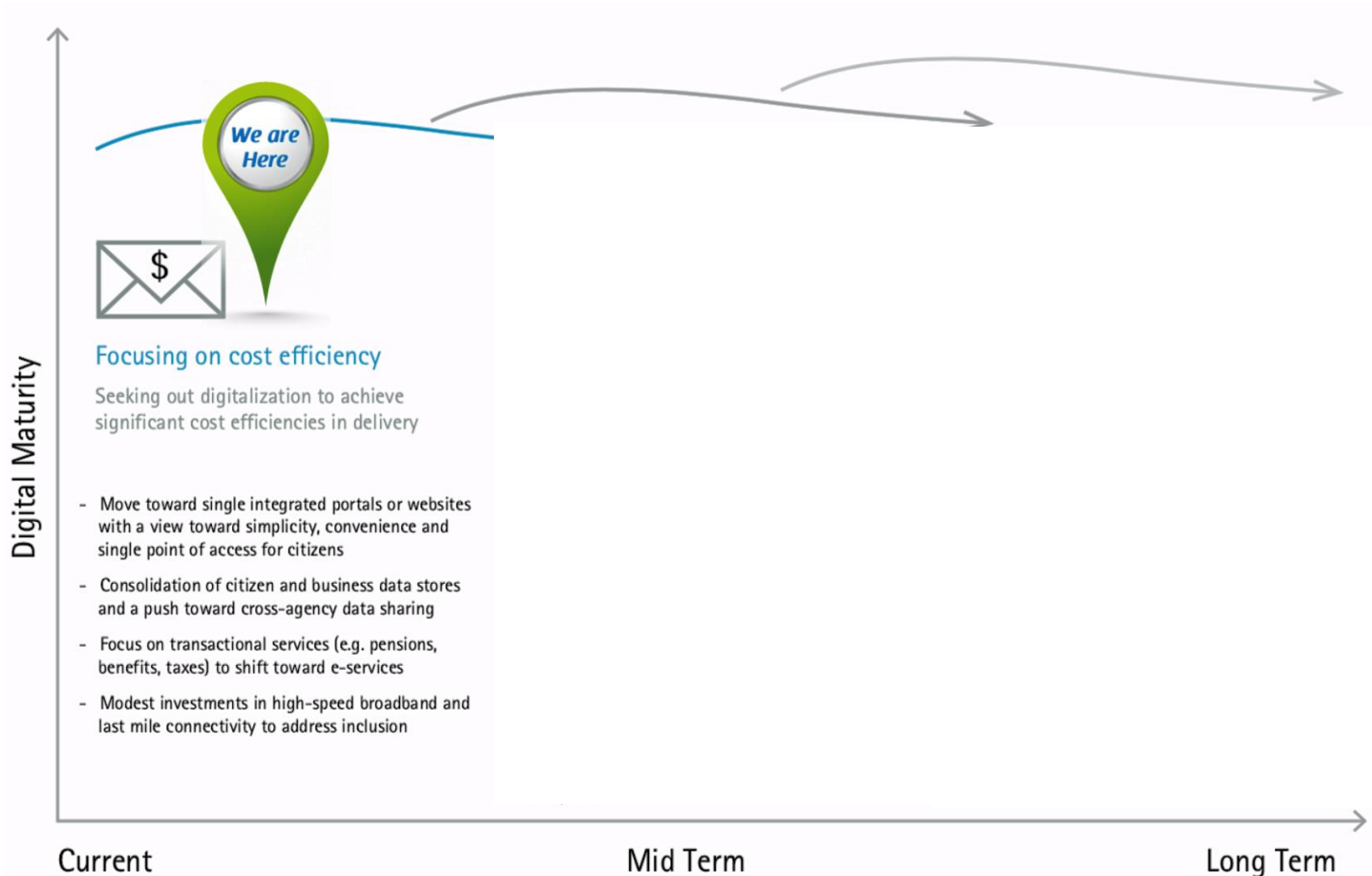


SATU PINTU, BANYAK JENDELA

ONLINE SINGLE SUBMISSION



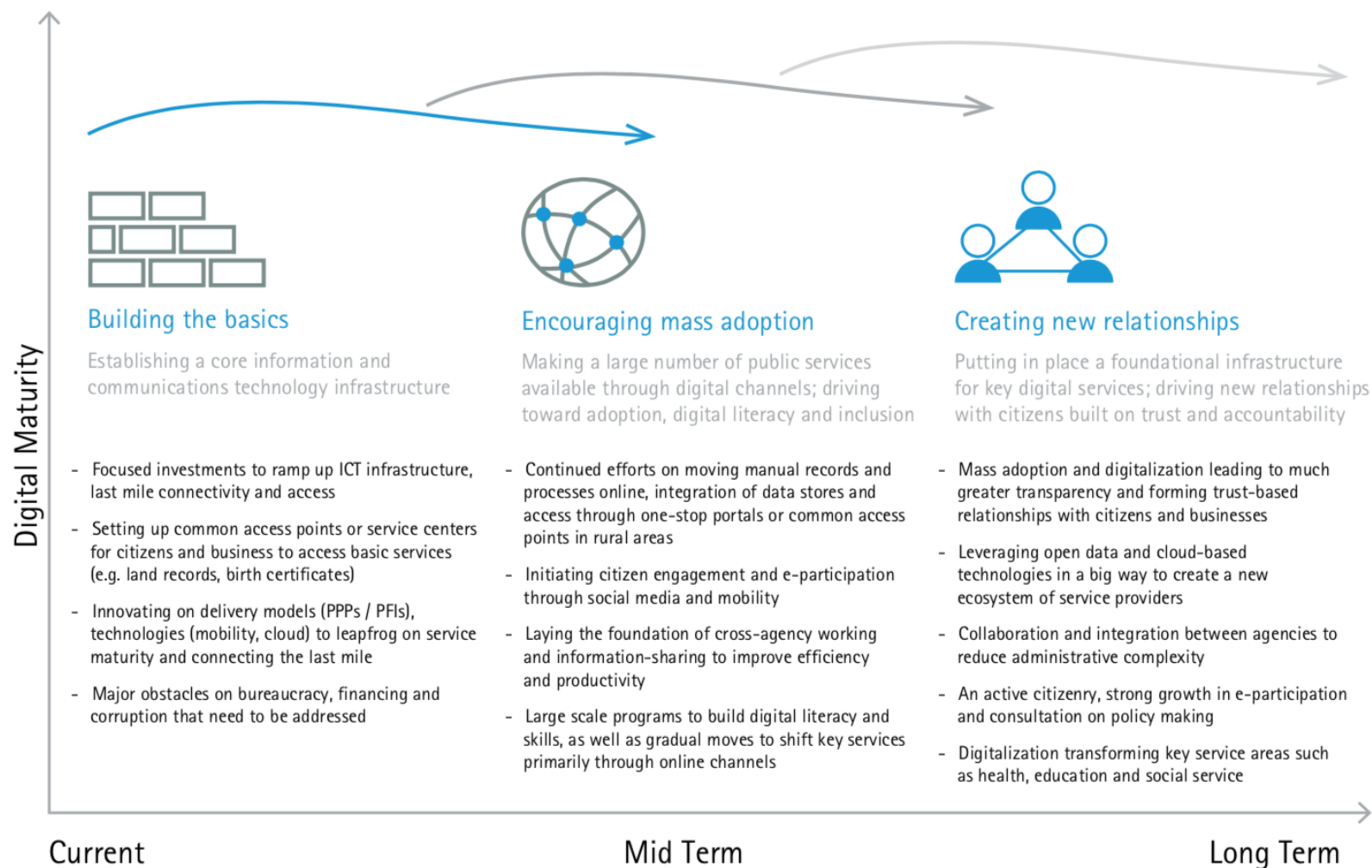
CUTTERS DIGITAL MATURITY JOURNEY...



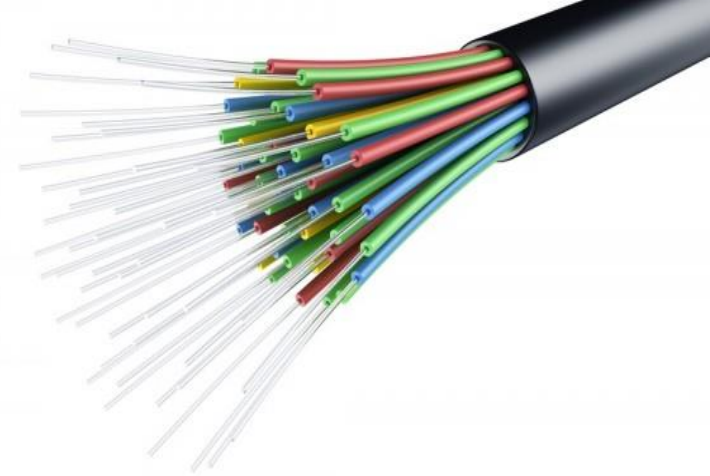
Source: *Achieving Digital Excellence in Public Service* (<http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/Accenture-Achieving-Digital-Excellence-in-Public-Service-US.pdf>), 2014

BUILDERS

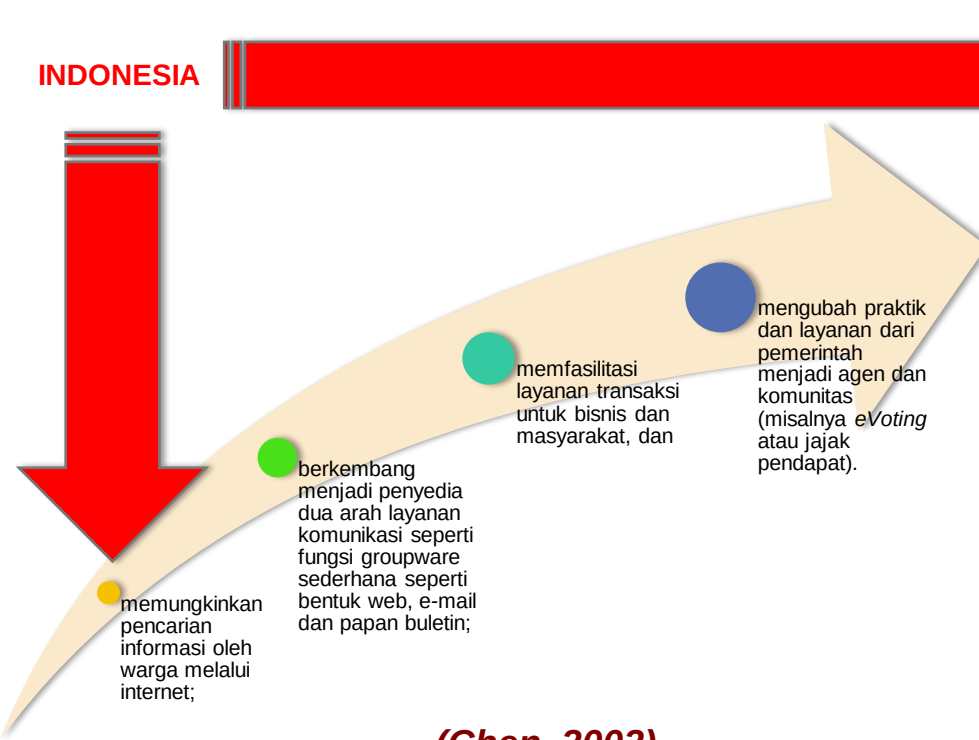
DIGITAL MATURITY JOURNEY...



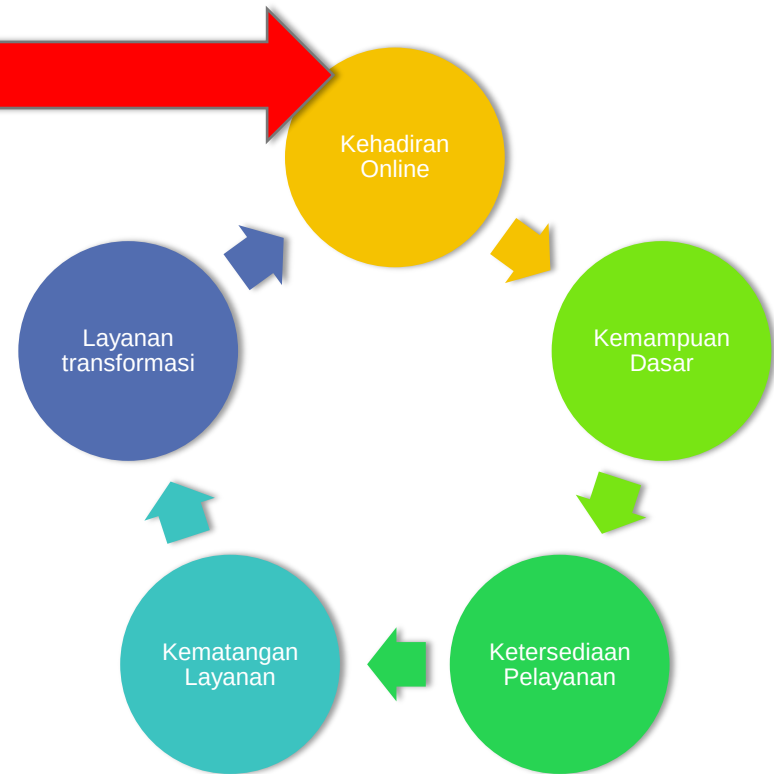
EKSISTING...



INDONESIA



(Chen, 2002)



(Accenture, 2002)

EKSISTING

HTTPS://WWW.OSS.GO.ID

- ❑ Terhitung 16 Oktober 2018, belum ada konfirmasi via email untuk aktivasi akun..

Jenis Identitas *) Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Nomor Induk Kependudukan (NIK) *) 3217022308780010 Isikan Nomor Identitas dari salah satu penanggung jawab yang tercantum dalam akta (untuk jenis pelaku usaha non perseorangan)	Email Perusahaan *) mdenjatm@gmail.com Pastikan alamat email anda dapat menerima segala notifikasi dari sistem OSS.
Jenis Pelaku Usaha *) Non Perseorangan Perwakilan khusus untuk Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dan Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing di Indonesia	Nama (sesuai KTP) *) MAS DADANG ENJAT MUNAJAT	Tanggal Lahir *) 23-08-1978 Format : (dd-mm-yyyy)
Negara Asal *) +62) - Indonesia	Nomor Telepon *) 8164215955 Contoh : 085712345678 menjadi 85712345678	Website (optional) Website
Kode Captcha *) KUPANG KUPANG		

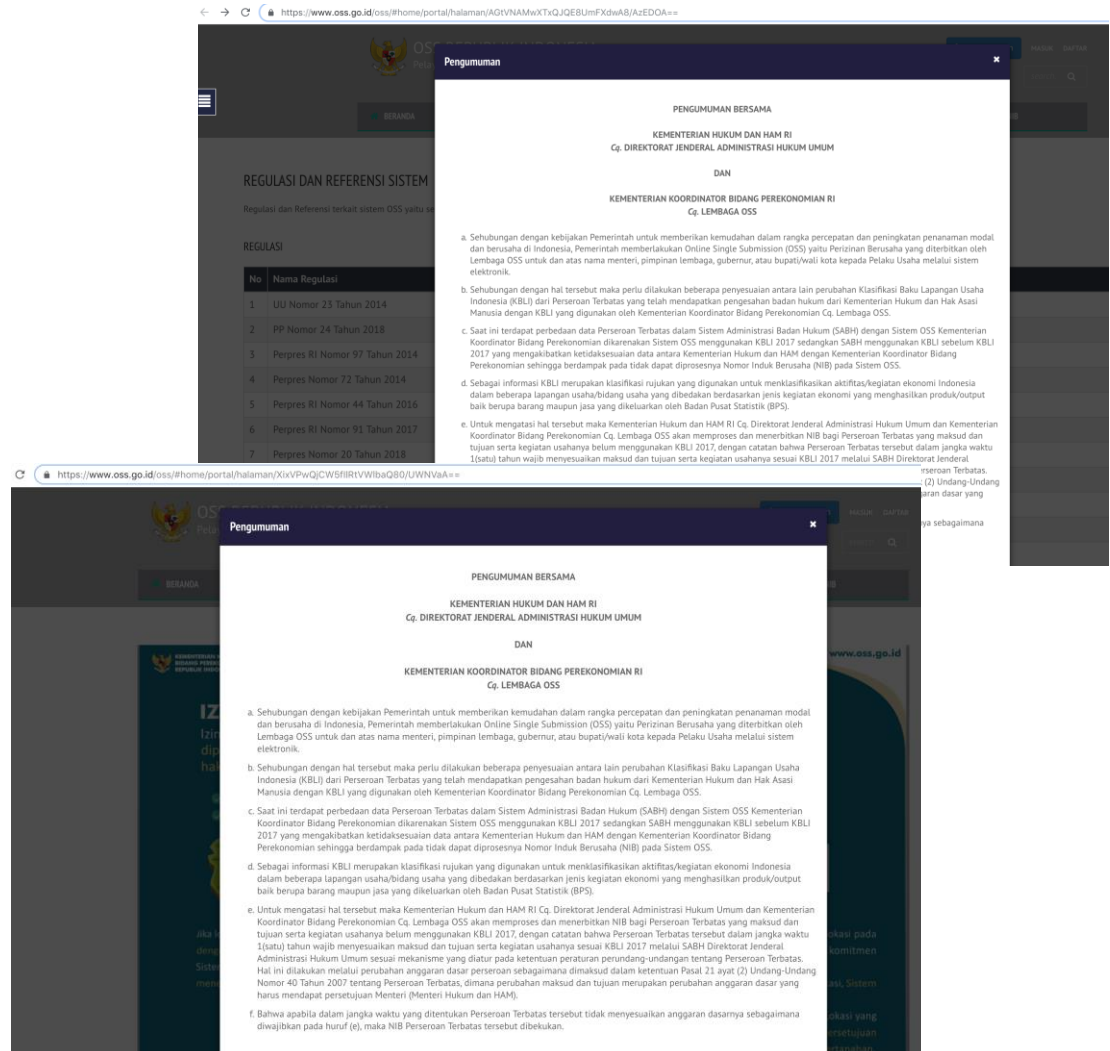
[Sava](#) mengerti dan menerima [Syarat dan Ketentuan](#) penggunaan sistem OSS

Konfirmasi akun dikirim via email, akan tetapi hingga saat ini (3 hari setelahnya) belum menerima konfirmasi di email...!!!

EKSISTING

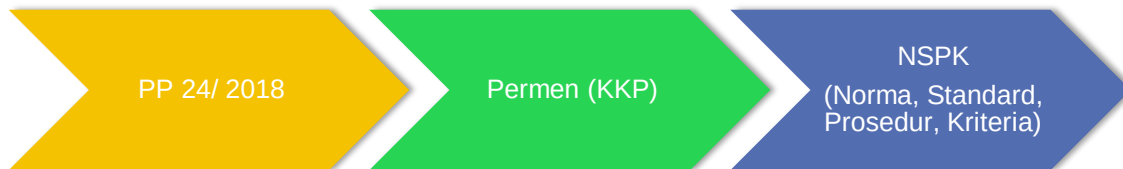
HTTPS://WWW.OSS.GO.ID

- ❑ Halaman website, sulit diakses karena tertutup oleh menu Pop-up yang sulit ditutup...
- ❑ Ini terjadi di beberapa halaman yang sifatnya penting sebagai informasi awal sebelum mendaftar...

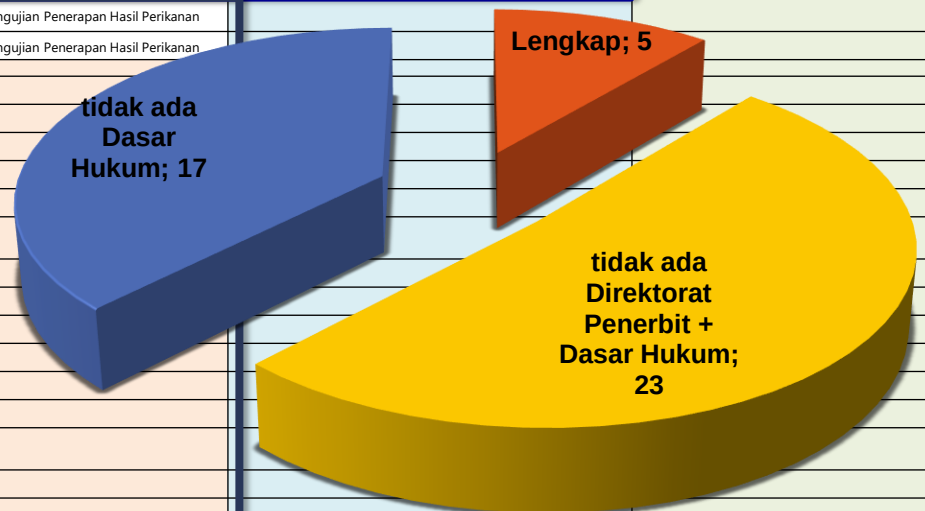


EKSISTING...

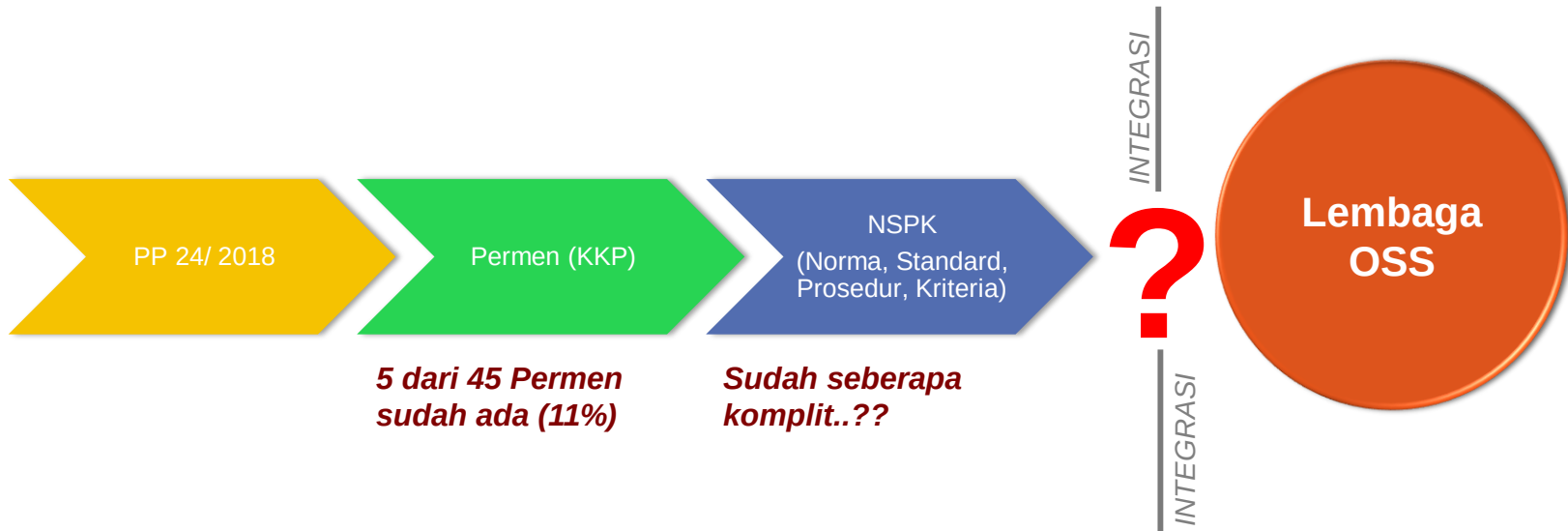
- Dalam lampiran PP 24 Tahun 2018, domain KKP ada sekitar 58 Perijinan (poin E. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN)
- Sementara di Website oss.go.id → sudah terdapat sekitar 45 perijinan



No	Nama Perizinan	Jenis Perizinan	Direktorat Penerbit	DITJEN	Dasar Hukum
1	Surat Keterangan Teknis Impor Pakan dan Bahan Baku Pakan Ikan	Komitmen Izin Komersial / Operasional	Direktorat Pakan dan Obat Ikan	Ditjen Perikanan Budidaya	NOMOR PER. 02/MEN/2010
2	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	Komitmen Izin Komersial / Operasional	Subdit Pakan dan Obat Ikan	Ditjen Perikanan Budidaya	NOMOR PER. 02/MEN/2010
3	Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk nelayan kecil	Izin Usaha	Direktorat Pakan dan Obat Ikan	Ditjen Perikanan Budidaya	PERMEN KP Nomor 04 tahun 2012
4	Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan	Komitmen Izin Komersial / Operasional	Direktorat Pakan dan Obat Ikan	Ditjen Perikanan Budidaya	PERMEN KP Nomor 04/2012
5	Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik	Komitmen Izin Komersial / Operasional	Direktorat Pakan dan Obat Ikan	Ditjen Perikanan Budidaya	PERMEN KP Nomor 24 tahun 2014
6	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu /HACCP	Komitmen Izin Komersial / Operasional	Pusat Pengendalian Mutu	BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	
7	Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan	Komitmen Izin Komersial / Operasional	Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya	Ditjen Perikanan Budidaya	
8	Sertifikat Instalasi Karantina Ikan	Komitmen Izin Komersial / Operasional	Pusat Karantina Ikan	BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	
9	Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di Supplier	Komitmen Izin Komersial / Operasional	Pusat Pengendalian Mutu	BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	
10	Izin Pengelolaan Perairan di WP-3-K	Izin Usaha	Direktorat Perencanaan Ruang Laut	DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT	
11	Izin Pelaksanaan Reklamasi	Izin Usaha	Direktorat Jasa Kelautan	DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT	
12	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	Komitmen Izin Komersial / Operasional	Direktorat Usaha dan Investasi	DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	
13	Persetujuan Pengadaan Kapal	Komitmen Izin Komersial / Operasional	Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	
14	Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan Di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing	Izin Usaha	Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT	
15	Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik	Komitmen Izin Komersial / Operasional	Subdit Pakan dan Obat Ikan	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	
16	Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPII) yang dilindungi	Izin Usaha	Direktorat Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT	
17	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	Komitmen Izin Komersial / Operasional	Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	
18	Surat Izin Pemuliaan	Komitmen Izin Komersial / Operasional	Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT	
19	Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil	Izin Usaha	Direktorat Pemasaran	DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	
20	Tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan	Izin Usaha	Direktorat Pakan dan Obat Ikan	Ditjen Perikanan Budidaya	
21	Tanda daftar usaha pergaraman bagi petambak garam kecil	Izin Usaha	Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT	
22	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	Komitmen Izin Komersial / Operasional	Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu	DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	
25	Rekomendasi Pemasakan Hasil Perikanan untuk hotel, restoran, catering, pasar modern, umpan, dan pemindangan	Komitmen Izin Komersial / Operasional	Direktorat Logistik	DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	
26	Rekomendasi Pengeluaran Ikan Hidup	Komitmen Izin Komersial / Operasional	Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya	Ditjen Perikanan Budidaya	
27	Rekomendasi Pemasakan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Ikan Untuk Kepentingan Pameran, Eksebisi atau Kegiatan Sejenis	Komitmen Izin Komersial / Operasional	Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya	Ditjen Perikanan Budidaya	
28	Sertifikat Cara Pembesaran Ikan Yang Baik	Komitmen Izin Komersial / Operasional	Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya	Ditjen Perikanan Budidaya	
23	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia Hasil Perikanan (SPPT-SNI)	Komitmen Izin Komersial / Operasional	Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan		
24	Sertifikat Kesesuaian SPPT SNI untuk SNI Sukarela	Komitmen Izin Komersial / Operasional	Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan		
29	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	Izin Usaha			
30	Surat Izin Pelepasan	Komitmen Izin Komersial / Operasional			
31	Cek Fisik Kapal	Komitmen Izin Komersial / Operasional			
32	Buku Kapal Perikanan	Komitmen Izin Komersial / Operasional			
33	Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik	Komitmen Izin Komersial / Operasional			
34	Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik	Komitmen Izin Komersial / Operasional			
35	Surat Keterangan Pemakuan/ Pengeluaran Bahan Baku Obat Ikan, Obat Ikan, dan/atau Sampel Obat Ikan	Komitmen Izin Komersial / Operasional			
36	Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik	Komitmen Izin Komersial / Operasional			
37	Sertifikat Kesehatan (Health Certificate for Fish and Fish Products)	Komitmen Izin Komersial / Operasional			
38	Sertifikat Pelepasan	Komitmen Izin Komersial / Operasional			
39	Surat Persetujuan Pengeluaran Media dari Tempat Pemakuan	Komitmen Izin Komersial / Operasional			
40	Rekomendasi Impor komoditas pergaraman untuk konsumsi	Komitmen Izin Komersial / Operasional			
41	Surat Angkut Jenis Ikan yang Dilindungi/ Appendiks CITES	Komitmen Izin Komersial / Operasional			
42	Rekomendasi Pemanfaatan Jenis Ikan Hiu dan Pari yang tidak dilindungi, tidak dilarang keluar wilayah NKRI, dan tidak masuk dalam daftar Appendiks CITES	Komitmen Izin Komersial / Operasional			
43	Rekomendasi Izin Lokasi Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km2	Komitmen Izin Komersial / Operasional			
44	Sertifikat Pra Konvensi (CITES Certificate of Pre Convention)	Komitmen Izin Komersial / Operasional			
45	Sertifikat Introduksi dari Laut (Certificate of Introduction From The Sea)	Komitmen Izin Komersial / Operasional			



TANTANGAN... (1)



Tantangan :

- ✓ Proses perumusan Permen cukup memakan waktu,
- ✓ ditambah dengan turunan NSPK, bisa memakan waktu yang sangat lama untuk selesai
- ✓ sekaligus proses mengintegrasikan NSPK dengan Lembaga OSS, hitungan 1-3 tahun adalah waktu yang sangat cepat jika terealisasi..

REFORMASI PERIZINAN BERUSAHA PADA *LEADING SECTORS*

No	Sektor	Jumlah Izin Saat Ini		Jumlah Izin Reform		Keterangan
1	Perhubungan	Izin	68	Izin	46	- Terdapat pengintegrasian Izin dan penghapusan izin - Terdapat pengintegrasian non-izin dan penghapusan non-izin. Persetujuan dikategorikan sebagai izin. Sudah dikonfirmasi oleh sektor
		Non-Izin	129	Non-Izin	73	
2	Pertanian	Izin	26	Izin	12	29 Digabungkan* - Sudah dikonfirmasi oleh sektor
		Non-Izin	35	Non-Izin	18	
3	Kelautan dan Perikanan	Izin	32	Izin	11	- Terdapat pengintegrasian dan penghapusan Izin. SIUP merupakan izin dasar untuk setiap sub-sektor - Terdapat pengintegrasian dan penghapusan non-izin - Sudah dikonfirmasi oleh sektor
		Non-Izin	47	Non-Izin	33	
4	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Izin	15	Izin	5	5 Digabung*, 2 diintegrasikan prosesnya dengan AMDAL dan 3 dihapus - Sudah dikonfirmasi oleh sektor
		Non-Izin	8	Non-Izin	3	

Non-Izin: Standar, Rekomendasi, Pendaftaran, Sertifikasi dan Penetapan

*Digabungkan dengan catatan : Terdapat persyaratan yang berbeda untuk tipe yang berbeda

Sumber :

Materi presentasi 'pokok-pokok isi peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (oss)' kementerian Koordinator bidang perekonomian republik indonesia, 28 juni 2018

RISK IDENTIFICATION...



the development and introduction of a sophisticated .. screening mechanism for more effective targeting of programmes and services;



[government agencies] to establish risk-based criteria for identifying clients with labour market disadvantages at the new claim and review stages;



DSS to identify clients who are at risk of becoming long term unemployed at the new claim stage (by means such as trigger questions on claim forms); ...

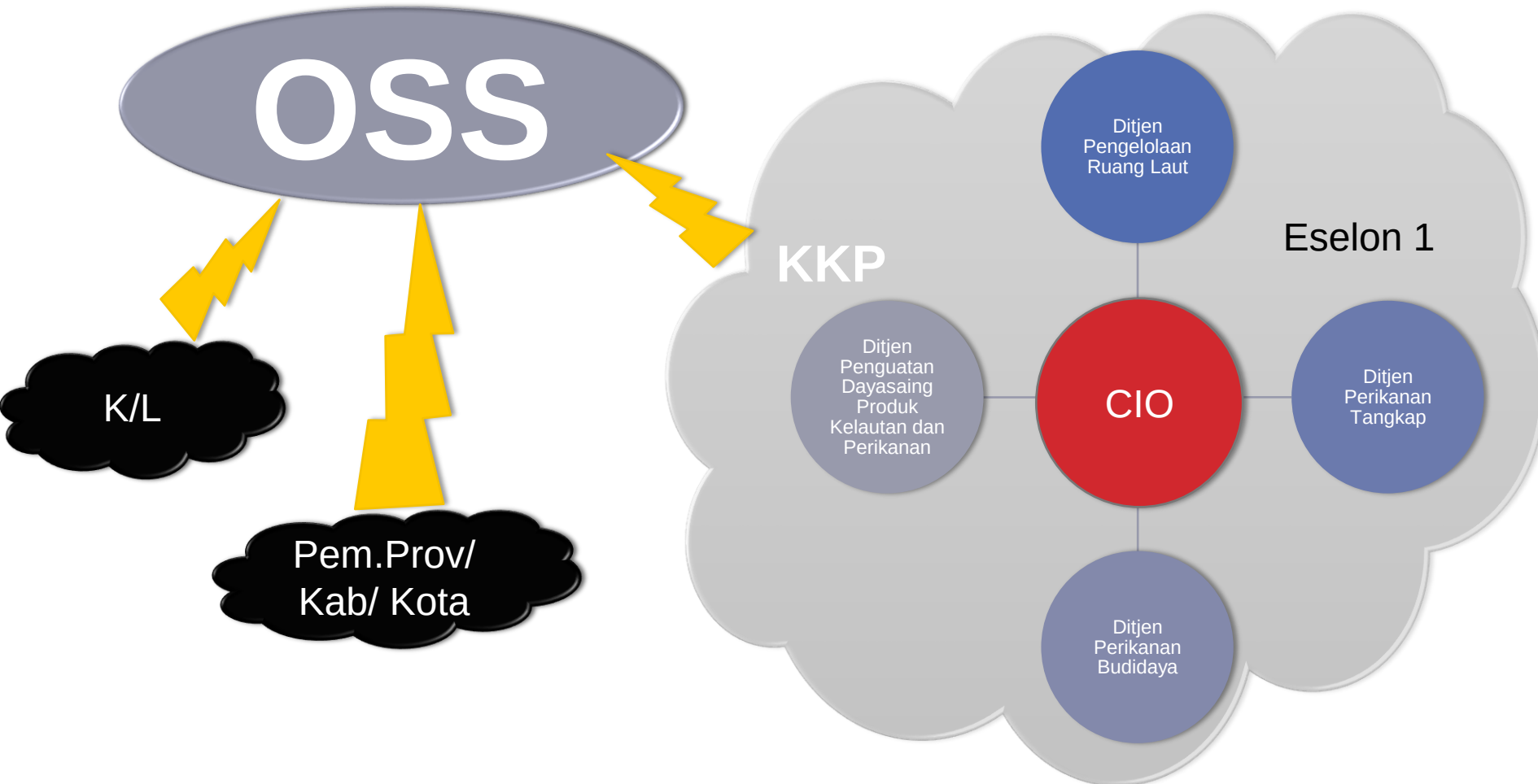


Clients with labour market disadvantages will be case managed and have detailed 'action plans' ... prepared for them;



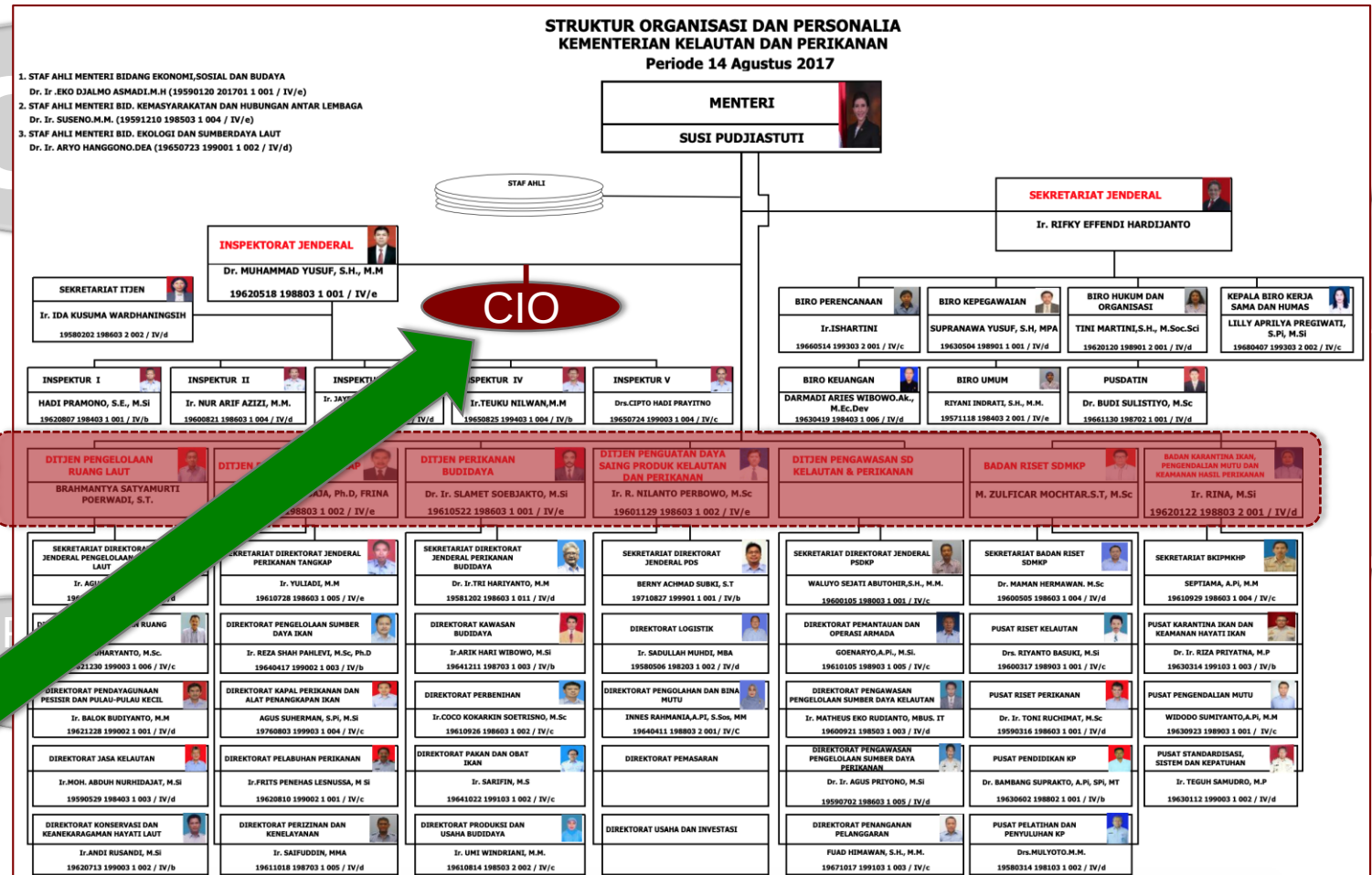
[the government employment agency] will redirect some intensive assistance from all long term unemployed clients to help those detected as 'at risk' at an earlier stage of unemployment (DSS 1993: 26–27, emphasis added).

TANTANGAN... (2)



Proses untuk konsolidasi NSPK, akan sangat sulit apabila ditangani oleh pejabat yang setara,

TANTANGAN... (3)



Idealnya, KKP membentuk satuan khusus untuk mengintegrasikan dan menangani OSS ini,.. Semisal CIO (Chief Information Officer, yang sejajar dengan Eselon 1 atau dibawah Menteri)

TANTANGAN... (4)

- ❑ **Hati-hati pada saat membentuk lembaga internal OSS di KKP, harus memperhatikan :**
 1. Analisa bisnis proses
 2. Pengelompokkan pekerjaan
 3. Analisa beban kerja
 4. Analisa Jabatan
- ❑ **Terkesan remeh, akan tetapi mengingat terdapat sekitar 40-an perijinan yang dipublish nampaknya akan lumayan rumit untuk memilah ke-4 hal tersebut.**

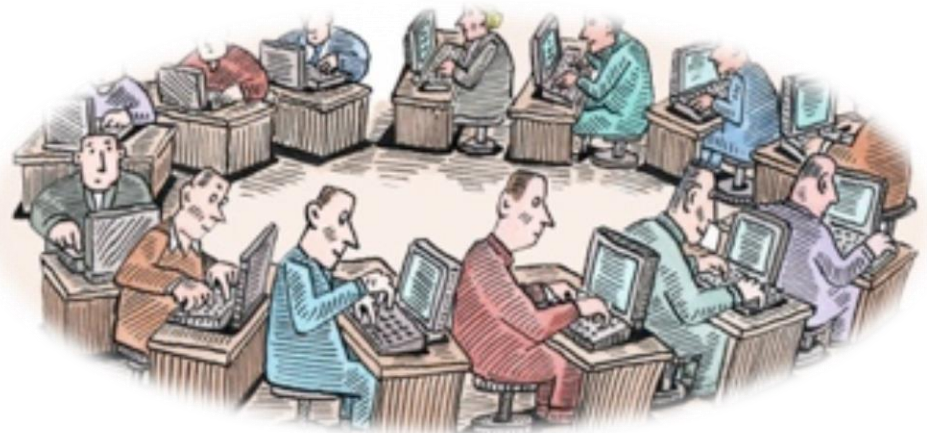


TANTANGAN... (5)

Barriers that arise from within the bureaucracy/organisation, these take the form of a :

- lack of sufficient human or financial resources,
- lack of management support,
- a risk-averse culture within the organisation,
- staff resistance, and a lack of incentives to innovate in the organisation as a whole or for individual staff members.

Obstacles may also be of an inter-organisational nature, stemming from difficulties in co-ordinating organisations, potentially due to turf wars and “silos”.



TANTANGAN... (6)

Barriers that arise primarily in the political environment, these include :

- inadequate funding/ resources,
- budgetary rules,
- legislative or regulatory constraints,
- a lack of incentives for organisations to innovate and
- political opposition as well as a lack of political commitment.



Politics

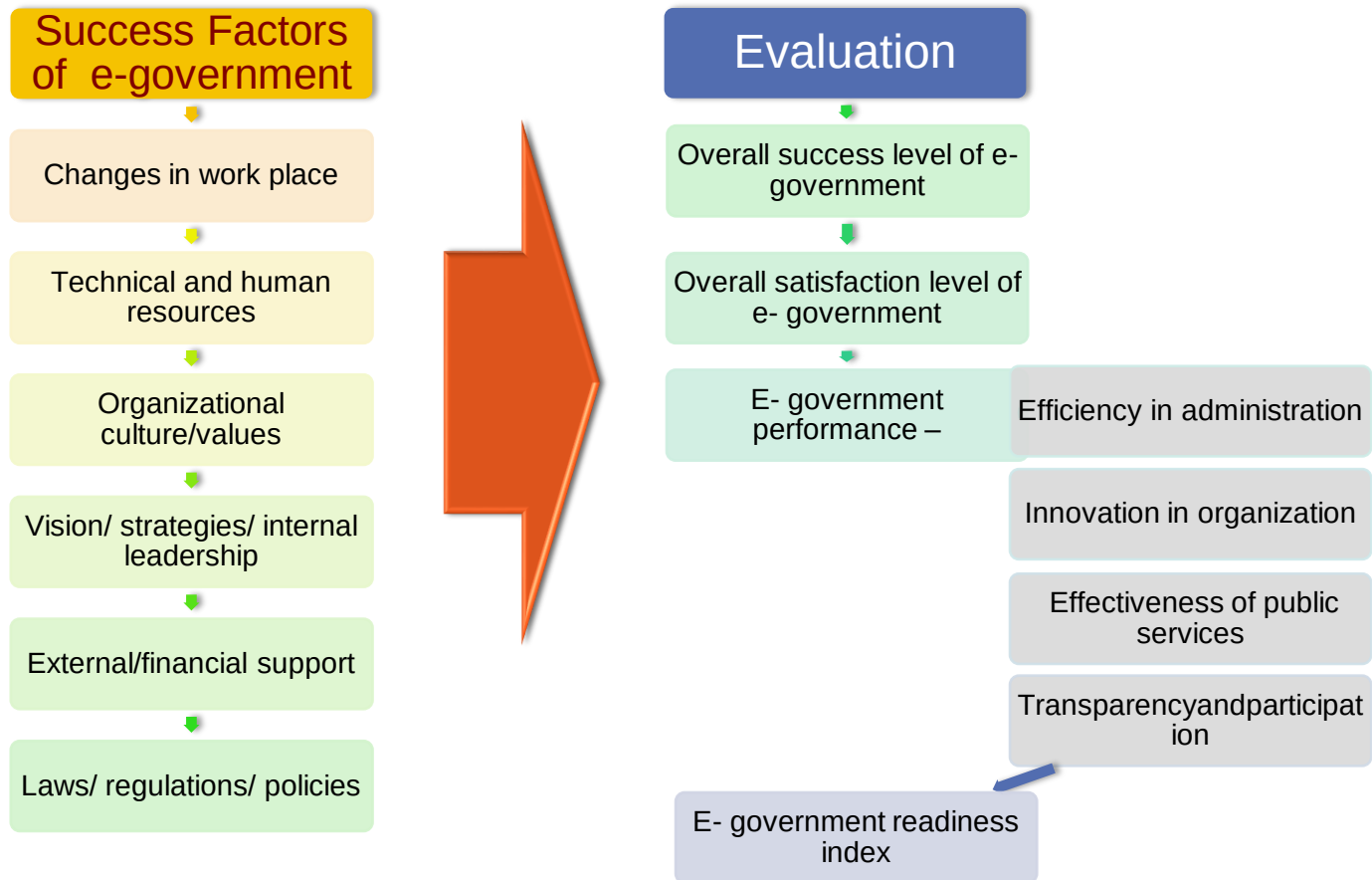
TANTANGAN... (7)

Barriers that exist in the external environment, This refers to

- uncertainty in terms of which innovations will be accepted and the prospect of general public scepticism or even opposition.
- Being subject to media scrutiny might also curb the willingness to take chances, as might conflicting external interests and difficulties in reaching the programme's target group.



LEARN FROM SOUTH-KOREA



LEARN FROM SOUTH-KOREA

E-Govt Success Factor	Efficiency in administration	Innovation in organization	Effectiveness of public services	Transparency & participation	Average
Vision/strategies/ internal leadership	0.976	0.747	0.381	0.54	0.66
Political Stability	0.445	0.319	0.541	0.671	0.49
Laws/regulations/ policies	0.187	0.504	0.858	0.199	0.44
Organizational culture/values	0.195	0.436	0.131	0.927	0.42
Technical/human resources	0.503	0.321	0.112	0.434	0.34
External /financial support	0.464	0.168	0.56	0.047	0.31
Changes in work place	0.425	0.007	0.023	0.016	0.12

(Sukyoung Shin dkk, 2008)



CONCLUSSION...

“ proses mengintegrasikan kedalam OSS adalah pekerjaan yang tidak mudah, tetapi akan lebih sulit kalau tidak pernah dimulai...! “

(irawati, 2018)

“ mulai dari yang kecil, Mulai dari diri sendiri, Mulai dari saat ini. “

(Aa Gym, 19xx)

TERIMA KASIH...

Dr. Hj. R. Ira Irawati, MS
ira.irawati@unpad.ac.id